

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Upaya strategis dalam memaksimalkan kualitas sumber daya manusia yakni melalui pendidikan.³ Program pendidikan merupakan hak yang harus diterima oleh seluruh warga negara, sekaligus kebutuhan dan usaha sadar untuk menuntun perkembangan manusia menuju kematangan usia. Pendidikan menjadi pilar yang kokoh untuk mencapai tujuan bangsa di masa depan, dari pendidikan yang bermutu terlahir dari sumber daya manusia yang terus ditingkatkan sehingga mampu mengatur dan mengelola lembaga pendidikan.

Sesuai arahan Muhajir Efendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Tahun 2020, pemerintah saat ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan membuka kompetensi keahlian produksi film. Pasalnya, mulai banyak investor asing dalam dunia industri film yang terus mengembangkan kreatifitasnya di tanah air. Pembukaan kompetensi keahlian tersebut difokuskan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk membekali siswa dengan ketrampilan teoritis dan pengalaman praktis sesuai dengan kebutuhan industri. Pada survei 2023, terdapat beberapa SMK yang sudah membuka kompetensi keahlian produksi film, sekitar 112 SMK.⁴ Sebagai

³ Irhash, Krisna, Nihayah, Dkk, 'A Systematic Literature Review: Strategi Pengembangan Usaha Mikro Dan Menengah (Umkh) Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Sosial Sains*, P. 66.

⁴ "<https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pembukaan-jurusan-baru-di-smk-perfilman-peran-dan-dukungan-pemda-dibutuhkan>," *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud*, 5 Oktober 2024.

kompetensi keahlian yang tergolong baru tentunya produksi film membutuhkan sarana dan yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan.

Sarana menjadi elemen penting untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran maupun aktivitas di lingkup pendidikan. Sarana merupakan alat penunjang siswa untuk melaksanakan pembelajaran.⁵ Untuk mendapatkan hasil belajar dan kompetensi siswa yang baik, maka diperlukan pengembangan sarana yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan lembaga pendidikan. Dalam mewujudkan program tersebut, tentunya lembaga pendidikan tidak terlepas dari aspek pembiayaan.

Proses pendidikan yang berjalan tanpa biaya tidak akan bisa mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah telah mengatur standar pembiayaan pendidikan agar dapat berjalan dengan sistematis dan tepat sasaran.⁶ Pembiayaan pendidikan adalah aspek yang sangat penting krusial menunjang tujuan pendidikan. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang didalamnya terdapat mengenai pengelolaan anggaran pendidikan yang salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang kemudian diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi pusat dari program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Adapun dasar hukum yang melandasi pendanaan pendidikan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pada Pasal (1) Ayat 3 dijelaskan bahwa

⁵ Dewi, Annisa, Aslamiah,dkk, "Konstruksi Pemahaman Pentingnya Sarana Prasarana di Sekolah," *EDUMASPUL : Jurnal Pendidikan* Vol. 6 – No. 1 (t.t.): 1355.

⁶ Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)* (Bandung: Tresna Bhakti, t.t.) Hlm 110.

anggaran pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk melaksanakan dan mengatur tata kelola lembaga pendidikan.⁷

Adapun program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhannya. Program pemerintah Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada sekolah baik negeri maupun sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sebagai pelaksana wajib belajar. Adapun tujuan penyaluran dana BPOPP untuk personalia yang meliputi : meringankan biaya siswa agar memperoleh akses pendidikan yang sama, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan wajib belajar yang bermutu.⁸

Keberhasilan dari terlaksananya program BPOPP dipengaruhi oleh manajemen dana dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan tersebut. Pengelolaan dana BPOPP yang baik akan membantu tercapainya tujuan pendidikan khususnya untuk peningkatan kualitas kompetensi keahlian, karena sekolah sebagai objek sekaligus posisi sentral yang langsung terkait dalam penyaluran program pemerintah tersebut.⁹

Salah satu lembaga pendidikan yang membuka kompetensi keahlian dan memiliki sistem keuangan yang baik adalah SMK Al-Huda Kota Kediri. Peneliti memberikan dasar bahwa SMK Al – Huda Kota Kediri memiliki keunggulan

⁷ Peraturan Pemerintah, Legis. No. Nomor 48 Tahun 2008.

⁸ Tirhantoyo S, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2020)Hlm 37-38.

⁹ Fitriani Masruroh, M S., “Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta” 7, *Jurnal Ilmu Pendidikan.*, No. 2 (t.t.): Hlm 522–523.

dengan menggapai pencapaian sebagai SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) yang diluncurkan oleh Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 2022. Selain itu SMK Al – Huda Kota Kediri, juga mengadakan kegiatan pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar, program magang ke Jepang melalui lembaga pelatihan PT Oosaka Gakkou, dan mengadakan *job fair* dari tiga puluh (30) perusahaan baik rasio lokal, regional maupun nasional.¹⁰ Oleh karena itu, program pendidikan yang menciptakan citra baik tentunya tidak lepas dari peran manajemen keuangan sekolah.

Bersandarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu tentang pengadaan sarana kompetensi keahlian produksi film dalam pengelolaan anggaran BPOPP melalui manajemen keuangan dengan judul **“Implementasi Manajemen Keuangan BPOPP dalam Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film di SMK Al – Huda Kota Kediri”**

B. Fokus Penelitian

Penulis akan menyajikan dan menganalisis dengan menggunakan teori dan beberapa kajian literatur sehingga fokus penelitian tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan BPOPP dalam Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film di SMK Al-Huda Kota Kediri ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembukuan BPOPP dalam Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film di SMK Al-Huda Kota Kediri ?

¹⁰“<https://radarkediri.jawapos.com/pendidikan/784975415/punya-kompetensi-keahlian-smk-al-huda-kota-kediri-jadi-smk-pusat-keunggulan?page=2>,” Website, t.t.

3. Bagaimana Evaluasi BPOPP dalam Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film di SMK Al-Huda Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memberikan sudut fokus pada aspek yang ingin dicapai dengan mencakup pemahaman secara mendalam. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Perencanaan BPOPP dalam Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film di SMK Al-Huda Kota Kediri.
2. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pembukuan BPOPP dalam Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film di SMK Al-Huda Kota Kediri.
3. Mendeskripsikan Evaluasi BPOPP dalam Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film di SMK Al-Huda Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan peran inovasi dan kemajuan riset ilmiah. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu menghasilkan kontribusi bagi peningkatan keilmuan manajemen pendidikan. Serta memberikan pemahaman mengenai implementasi manajemen dana BPOPP dalam peningkatan kompetensi keahlian khususnya produksi film. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dampak positif secara luas pada kebijakan pada lembaga pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan kebijakan dasar dalam proses manajemen keuangan lembaga pendidikan untuk mengembangkan sarana kompetensi keahlian produksi film di SMK Al-Huda Kota Kediri.

b. Bagi Bendahara Sekolah

Hasil penelitian ini dijadikan acuan dan landasan pemikiran untuk peningkatan keilmuan manajemen keuangan dalam memenuhi kebutuhan operasional pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Al Huda Kota Kediri.

c. Bagi Waka Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan pemikiran *stakeholder* untuk mengoptimalkan pengadaan sarana di sekolah khususnya pada produksi film sehingga dapat menunjang kualitas pembelajaran secara maksimal.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini tentunya menambah wawasan khususnya bagi peneliti mengenai manajemen keuangan yang dapat di alokasikan pada sarana kompetensi keahlian untuk memenuhi kebutuhan dalam lembaga pendidikan.

E. Penelitian Terdahulu

Paparan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara fokus yang diteliti oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

Pertama, Rita Pusvitasari dan M. Sukur dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo”, 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis manajemen keuangan dalam pemenuhan sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan sekolah dilakukan melalui perencanaan anggaran, penyerapan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.¹¹

Kedua, Nani, Dian dan Firman dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Sarana Prasarana dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 1 Maja, Kab. Majalengka”, 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penganggaran, pencatatan, serta menganalisis pengawasan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan di SMPN 1 Maja sangat berkontribusi pada pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan.¹²

¹¹ M. Sukur Rita Pusvitasari, “Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo,” *Al- Tanzim ; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol.4, No.1 (2020): 94.

¹² Nani, Dian dan Firman, “Manajemen Pembiayaan Sarana Prasarana dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 1 Maja Kab. Majalengka,” *Change Think Journal* Vol.1, No. 3 (2022): 254.

Ketiga, Adriana dan Alifia Maharani dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Bekasi”, 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SDN Wanasari 01. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan sekolah melalui perencanaan anggaran, pembukuan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.¹³

Keempat, Masbullah, Amru, Naili, dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan”, 2023. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan sekolah dilaksanakan dengan optimal dibuktikan dengan ketersediaan sarana prasarana yang sesuai standar. Pengelolaan keuangan dilakukan menggunakan prinsip transparansi.¹⁴

Kelima, Senang, Erik dan Sunardi dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Keuangan Madrasah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan”, 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen keuangan di MA Al-Washoya Jombang dalam fokus pengadaan sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

¹³ Adriana Hanny Alifia Maharani, “Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi,” *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol.4, No.1 (2022): 45.

¹⁴ Masbullah, Amru, Naili, dkk, “Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan,” *Al-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya* Vol.6, No.1 (2023): 92.

Hasil dari penelitian ini manajemen keuangan di MA Al-Washoya Jombang sudah cukup baik, namun perlu pengoptimalan dalam hal pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan di MA Al-Washoya Jombang.¹⁵

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan. Berikut tabel pemaparan hasil penelitian :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo	Membahas manajemen keuangan sekolah untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.	Penyaluran dana sekolah dipergunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan di jenjang Sekolah Dasar.
2.	Manajemen Pembiayaan Sarana Prasarana dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 1 Maja, Kab. Majalengka	Membahas manajemen keuangan untuk pengadaan sarana prasarana pendidikan.	Penyaluran dana sekolah dipergunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan.
3.	Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Bekasi	Membahas manajemen keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.	Penyaluran dana sekolah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di jenjang Sekolah Dasar.
4.	Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Membahas manajemen keuangan sekolah untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.	Penyaluran dana sekolah dipergunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan.
5.	Manajemen Keuangan Madrasah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.	Membahas manajemen keuangan dana sekolah untuk pengadaan sarana prasarana pendidikan.	Penyaluran dana sekolah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di MA.

Sumber : Peneliti, 2025

¹⁵ Senang, Erik dan Sunardi, "Manajemen Keuangan Madrasah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan," *At Tadbir: Islamic Education Management Journal* Vol.2, No.2 (2024): Hlm 97.

Beberapa penelitian terdahulu diatas, memberikan dasar gambaran dan pemahaman mengenai topik yang akan dilakukan oleh peneliti. Temuan-temuan tersebut akan membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks penelitian.

F. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan pengoperasian fungsi-fungsi keuangan tentang mendapatkan anggaran dan menggunakan anggaran.¹⁶ Dikdasmen dalam Wardija, mengatakan bahwa manajemen keuangan utamanya sekolah adalah tata kelola keuangan yang mencakup proses pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.¹⁷ Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian proses atau kegiatan tata kelola bagian keuangan dengan berbagai langkah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

2. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP)

Dana BPOPP merupakan serangkaian program dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui program Nawa Bhakti Setya yang menyediakan pendanaan biaya penunjang operasional pendidikan untuk SMA dan SMK yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa

¹⁶ Erwin Dan Handini, *Manajemen Keuangan Teori Dan Praktek*, Edisi 1 (Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020) Hlm 2.

¹⁷ Rusdiana Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah (Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah)*, Edisi Revisi (ARSAD PRESS, t.t.).

Timur.¹⁸ Dana BPOPP dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah, salah satunya untuk pengadaan sarana prasarana dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dengan mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah.

3. Pengadaan Sarana Pendidikan

Pengadaan sarana pendidikan merupakan kegiatan untuk menyediakan kebutuhan warga sekolah baik yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran atau secara tidak langsung. Adapun sarana yang berhubungan langsung seperti media belajar. Serta prasarana yang secara tidak langsung mendukung proses pembelajaran peserta didik, seperti gedung sekolah, lapangan, kantin, laboratorium, parkir.

¹⁸ Angger Aristia, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 13, Nomor 1 (2024), Pp. 3–4.